

TAJUK RENCANA

Oknum di Balik Judi Daring

GEBRAKAN pemerintahan Prabowo dalam memberantas perjudian online atau daring patut mendapat dukungan penuh masyarakat. Kepolisian tidak hanya menyoal masyarakat umum yang terlibat judi daring, melainkan juga oknum dari instansi pemerintah. Dalam perkembangan, Dirreskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 orang oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdi), sedang 4 orang lainnya warga biasa (KR 4/11).

Keterlibatan oknum di Kemenkomdi sebenarnya sudah terendus cukup lama, namun baru belakangan ini polisi mengantongi cukup bukti sehingga menersangkakan mereka. Berkah baru belakangan ini mereka terlibat dalam perjudian online? Boleh jadi mereka sudah beraksi cukup lama ketika persoalan judi online belum menjadi isu nasional dan mengundang perhatian publik. Langkah kepolisian kali ini nampak sangat serius, bahkan mereka sampai menggeledah kantor Kemenkomdi untuk mendapatkan barang bukti.

Kita mengapresiasi kerja-kerja aparat kepolisian maupun Kemenkomdi serta PPATK yang bahu-membahu untuk memberantas perjudian daring. Berdasar temuan kepolisian, oknum di Kemenkomdi terlibat dalam penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi daring. Mereka yang seharusnya memblokir akun judi online malah membiarkannya. Dari penyalahgunaan wewenang itulah diduga mereka mendapat imbalan dari pengelola judi daring.

Ironisnya, mereka yang ditangkap polisi adalah bagian dari tim pengendali konten-konten negatif, termasuk judi online. Bisa dibayangkan, oknum tersebut seharusnya menutup akun-akun judi online, namun malah membiarkannya. Penyalahgunaan ini tentu berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkomdi yang sering mengumumkan telah menutup akun konten perjudian. Sebab, nyatanya ada akun-akun tertentu yang dibiarkan beroperasi.

Kita khawatir bila nanti muncul sinisme di masyarakat bahwa apa-

rat melakukan tebang pilih dalam pemberantasan judi daring. Hanya akun-akun tertentu yang diblokir, sedang akun lainnya dibiarkan hidup dan terus beroperasi. Dalam konteks ini kita mengapresiasi keberanian aparat penegak hukum, terutama kepolisian, mengungkap keterlibatan oknum di Kemenkomdi.

Terkait hal itu, kita mendorong agar momentum ini digunakan untuk melakukan pembersihan besar-besaran, tak hanya di istitusi Kemenkomdi, melainkan juga jajaran penegak hukum pada umumnya, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Pertanyaannya kemudian, apakah hanya pegawai biasa di Kemenkomdi yang terlibat dalam perjudian daring? Apakah tindakan mereka tanpa sepengetahuan atasan? Tentu ini menjadi tugas aparat kepolisian untuk melacaknya.

Kita hanya mengingatkan cara kerja hukum pidana yang tidak hanya menjerat pelaku utama, melainkan juga mereka yang melakukan secara bersama-sama, ikut serta, membantu, memberi sarana, bahkan memberi kesempatan terjadinya tindak pidana (perjudian daring), dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Sedang ancaman pidananya tentu tergantung pada andil mereka, sejauh mana keterlibatannya dalam perjudian daring. Konkretnya, atasan oknum Kemenkomdi yang membiarkan anak buahnya menyalahgunakan wewenang berupa tidak memblokir konten atau situs perjudian, juga harus diminta pertanggungjawaban hukum.

Kita berharap pemberantasan judi online bukan sekadar gerak sambal, parsial dan sesaat. Kita meyakini judi online melibatkan pemodal besar yang diduga terus mendekati pengambil kebijakan dengan berbagai cara, termasuk dengan menyuap. Pemerintah selaku regulator dan pemegang kebijakan tak boleh kalah, jangan biarkan ada oknum bermain mata dengan pegelola judi online. Hemat kita, penangkapan oknum di Kemenkomdi, hanyalah langkah awal untuk membongkar keterlibatan oknum lebih besar yang jauh lebih punya kewenangan dalam pemberantasan perjudian. □d

Peduli Pertanian

PERTANIAN merupakan salah satu sektor prioritas pada pembangunan nasional. Terkait hal ini tentu tidak bisa terlepas dari mayoritas pelaku di sektor pertanian dan sebutan republik ini sebagai negara agraris. Karena itu, beralasan jika Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun ketahanan pangan menuju swasembada pangan pada tahun 2025 atau dalam tempo secepatnya.

Di satu sisi, pencapaian target swasembada tidak bisa terlepas dari kepentingan kompleks, tidak hanya kesejahteraan petani tetapi juga perluasan pertanian pangan secara menyeluruh. Di sisi lain, daya tarik pertanian pangan di republik ini juga cenderung menurun. Paling tidak, hal ini terlihat dari laju migrasi dari pedesaan ke perkotaan dan juga minimnya regenerasi di sektor pertanian pangan. Padahal, realitas ini berdampak negatif terhadap pasokan pangan. Oleh sebab itu, menjadi ancaman ketika ironi impor pangan cenderung semakin meningkat.

Pertanian

BPS merilis hasil Sensus Pertanian bahwa jumlah usaha pertanian nasional pada tahun 2023 turun 2,35 juta menjadi 29.360.833 unit di tahun 2023 dibandingkan data 2013 (sekitar 31.715.486 unit) atau turun 7,42% dibanding 2013. Selain itu, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada tahun 2023 yaitu 29.342.202 unit (turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu). Ironi lainnya dari total 29 juta petani di Indonesia masih didominasi usia tua 43-58 tahun (42,39%), usia 59-77

tahun (27,61%) dan usia 27-42 tahun ada 25,61%, usia di atas 78 tahun 2,24% dan untuk petani milenial usia 19-39 jumlahnya 16,78 juta orang. Dominasi petani milenial ada di Jawa Timur 971,1 ribu orang, Jawa Tengah 625,81 ribu orang, dan Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Data itu menjadi catatan menarik dikaitkan fakta ancaman sektor pertanian, terutama minimnya regenerasi di sektor pertanian dan juga maraknya migrasi dari pedesaan ke perkotaan, termasuk juga migrasi dari pekerjaan di sektor pertanian pangan

Edy Purwo Saputro

ke sektor informal. Fakta ini tentu tidak bisa disalahkan karena pelaku usaha di sektor pertanian juga berpikir logis ingin mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih layak di sektor pertanian sementara faktanya kesejahteraan di sektor pertanian pangan dalam kurun 10 tahun terakhir cenderung terus menurun. Bahkan kalkulasi hasil dari sektor pertanian cenderung merugi, sementara harga benih, pupuk dan komoditas lain juga cenderung semakin mahal sementara harga gabah di tingkat

bagi pemerintahan Prabowo untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Terkait kasus ini Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI) 2024 menegaskan bahwa kelaparan penduduk dunia pada 2023 sekitar 733 juta jiwa. Kalkulasi dari data ini secara tidak langsung menjadi catatan bahwa persentase angka kelaparan global mencapai 9% atau meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 7,9%. Jika ini tidak bisa diantisipasi maka di tahun 2030 angkanya akan semakin tinggi dan pastinya menjadi ancaman global.

Pangan

Problem kompleks di balik ketahanan pangan global maka era pemerintahan Prabowo bertekad mampu mengembalikan ketahanan pangan nasional dan alokasi dana untuk mencapai komitmen itu sebesar Rp 139,4 triliun. Besaran dana itu setidaknya mampu dialokasikan untuk ketahanan pangan

pada 2025. Artinya, setahun ke depan ketahanan pangan nasional setidaknya bisa direalisasikan dan mampu mereduksi ancaman impor sejumlah komoditas pertanian pangan. Padahal besaran impor akan sangat berdampak terhadap neraca perdagangan dan bukan tidak mungkin akan

terjadi defisit. Fakta dari kasus ini menjadi catatan menarik bagi pemerintahan Prabowo untuk konsisten dalam mencapai ketahanan pangan meski diakui pencapaiannya tidaklah mudah, sebab harus bersinergi dengan sejumlah departemen, termasuk juga sinergi lintas sektoral. □d

**) Dr Edy Purwo Saputro SE MSI - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo.*



KR-JOKO SANTOSO

petani tidak mampu mendongkrak taraf kesejahteraan petani secara sistematis dan berkelanjutan. Fakta ini secara tidak langsung menegaskan argumen di balik persepsian minor dari pertanian.

Belajar bijak dari pentingnya membangun dan menjaga ketahanan pangan demi bisa merealisasikan swasembada pangan maka logis jika peringatan Hari Pangan Sedunia (16 Oktober) kemarin tidak bisa terlepas dari ancaman krisis pangan, bukan hanya di lingkup nasional tapi juga global. Ironisnya, situasi ini masih diperparah oleh realitas peperangan yang terjadi dengan sejumlah faktor yang mendasarinya. Karena itu, menjadi tantangan yang sangatlah berat

Penduduk Lanjut Usia : Beban atau Harapan?

ORGANISASI kesehatan dunia, WHO, memprediksikan pada tahun 2030 jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia naik sekitar 30 persen menjadi 1,4 milyar penduduk, dan pada tahun 2050 akan bertambah dua kali lipat menjadi 2,1 miliar penduduk. Banyak negara telah memasuki masa penuaan penduduk atau *aging population*, dengan proporsi jumlah penduduk lanjut usia di atas 20 persen dari total jumlah penduduk. Di Indonesia, BPS mencatat persentase penduduk lanjut usia pada tahun 2023 sebesar 6,98 persen, sedang Bappenas memperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk lanjut usia sekitar 20 hingga 25 persen dari total jumlah penduduk.

Sementara, di provinsi DIY pada tahun 2023 proporsi penduduk lanjut usia sebesar 16,02 persen dari total jumlah penduduk. United Nations mengategorikan kondisi penuaan penduduk menjadi 3, yaitu 1). *aging society*, di mana proporsi penduduk lanjut usia mencapai 7 persen; 2). *aged society*, di mana proporsi penduduk lanjut usia lebih dari 14 persen; dan 3). *super aged society*, di mana proporsi penduduk lanjut usia lebih dari 20 persen. Dengan kondisi Total Fertility Rate (TFR) yang lebih rendah dari nasional, dan angka harapan hidup yang tinggi, diperkirakan provinsi DIY akan memasuki kondisi *aging population* lebih cepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Beban Keluarga dan Pemerintah

Menurunnya kapasitas dan kemampuan fisik penduduk lanjut usia seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan yang mandiri. Saat ini, keluarga menjadi tumpuan dan pendukung utama bagi lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peran seseorang dalam mengurus orangtua dan anak sekaligus menjadi semakin umum di masyarakat, yang lebih dikenal dengan istilah *sandwich generation*. Banyaknya penduduk lanjut usia juga memberikan dampak yang luas pada sektor kesehatan, seperti perlunya penyediaan perawatan jangka panjang, penyediaan tenaga *caregiver*, serta layanan medis.

Pinkan Mariskania Pasuhuk

Peningkatan layanan kesehatan akan menyebabkan lonjakan kebutuhan fiskal pemerintah, di samping kewajiban pemerintah untuk menyediakan jaminan kesehatan. Kinerja perekonomian secara umum diperkirakan menurun di masa depan dengan turunnya jumlah penduduk usia produktif, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Dengan kondisi tersebut, rasio ketergantungan juga akan semakin tinggi, yang berarti penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung penduduk usia non produktif (di bawah 15 dan di atas 64 tahun) yang jumlahnya lebih banyak. Namun demikian, apakah penduduk lanjut usia hanya dipandang sebagai beban ekonomi?

Lansia yang Aktif dan Mandiri

Di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan dengan proporsi penduduk lanjut usia yang cukup tinggi, layanan publik telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung aktivitas penduduk secara mandiri. Sebagai contoh, transportasi publik dapat diakses dengan mudah, penyediaan kursi prioritas, dan sebagainya. Keberadaan *senior citizen center* juga menjadi hal yang umum, di mana *senior citizen* dapat berinteraksi satu sama lain, melakukan aktivitas beragam yang dapat mendukung keaktifan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan fisiknya. Di Indonesia, dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, pemerintah mengadvokasi keberadaan Posyandu lansia di mana pengelolaan lebih berpusat pada komunitas dan masyarakat sekitar. Selain itu, juga terdapat program *active aging* seperti kelompok lansia yang membuat barang kerajinan, *ecoprint* dan sebagainya. Di Yogyakarta, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti program *active aging* dan Posyandu lansia. Hal ini me-

nunjukkan keaktifan penduduk lanjut usia cukup baik, dan menjadi potensi untuk mendorong kemandirian lansia dalam beraktivitas. Lebih jauh, penduduk lanjut usia juga perlu menjadi mandiri secara ekonomi, meskipun hal ini masih sulit dilakukan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja.

Banyaknya jumlah penduduk lanjut usia juga dapat berpotensi menumbuhkan *silver economy*, yaitu konsep ekonomi yang muncul dari peluang pemenuhan kebutuhan lansia, dan hal ini dapat mendorong tumbuhnya ekonomi sebagai pengganti turunnya jumlah penduduk usia produktif. Namun demikian, keberadaan *silver economy* perlu didukung oleh sistem, kebijakan dan regulasi yang tepat. Hal ini termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang inklusif untuk penduduk lanjut usia. Sebagai kesimpulan, *aging population* tidak hanya berpotensi menjadi beban di masa depan, namun juga harapan bagi tumbuhnya ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup lansia. □d

**) Pinkan Mariskania Pasuhuk, Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.*

Pojok KR

Judi online libatkan 12 oknum Kemenkomdi.

-- Kok baru dibongkar sekarang.

Prabowo akui kekurangan Indonesia agar diperbaiki.

-- Cara memperbaikinya harus benar.

Di sektor BBM-listrik, subsidi tak tepat sasaran Rp 100 triliun.

-- Siapa harus bertanggung jawab ?

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.